

**PERANAN K. H. AGUS SALIM DALAM KANCAH PERPOLITIKAN  
INDONESIA MASA REVOLUSI FISIK (1945-1950)**

**RINGKASAN SKRIPSI**



oleh:  
**Farida Dwi Handayani**  
**08406244004**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH**  
**JURUSAN PENDIDIKAN SEJARAH**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL**  
**UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

**2012**

## **Peranan K. H. Agus Salim dalam Kancah Perpolitikan Indonesia Masa Revolusi Fisik (1945-1950)**

Oleh: Farida Dwi Handayani  
Nim. 08406244004

### **ABSTRAK**

K. H. Agus Salim dilahirkan pada tanggal 8 Oktober 1884 di Kota Gadang, Kabupaten Agam (Bukittinggi), Sumatera Barat. Ia adalah putra dari Sutan Mohamad Salim dan Siti Zainab. K. H. Agus Salim adalah salah satu anak pribumi dari Kota Gadang yang telah berhasil menamatkan pendidikan formal di ELS dan HBS. Ia merupakan seorang tokoh yang pandai dalam hal mengarang sehingga banyak sekali tulisan-tulisan yang telah dihasilkan. Setelah kemerdekaan tahun 1945-1950 Ia masuk sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung, kemudian duduk sebagai menteri dalam beberapa kabinet hingga kepercayaan yang diberikan kepadanya sebagai penasihat Menteri Luar Negeri. Berbagai usaha perjuangan diplomasi yang dilakukan K. H. Agus Salim selama revolusi fisik (1945-1950) antara lain yaitu melalui meja perundingan, menghadiri *Inter Asian Conference*, misi diplomasi ke negara-negara Timur Tengah, dan meminta dukungan PBB dalam penyelesaian masalah Indonesia-Belanda.

Kata Kunci: K. H. Agus Salim, Politik, Indonesia (1945-1950)

### **A. Latar Belakang Masalah**

Tahun 1945-1950 merupakan fase dimana bangsa Indonesia berada pada tahap awal, yaitu tahap bagaimana bangsa Indonesia harus mempertahankan kemerdekaan serta mampu menjadi sebuah negara yang mandiri terbebas dari penjajahan bangsa asing. Bangsa Indonesia menempuh dua cara untuk mempertahankan kemerdekaan yaitu perjuangan diplomasi dan perjuangan bersenjata.<sup>1</sup> Ketika para pejuang bangsa sedang bahu-membahu mempertahankan Indonesia melalui perjuangan bersenjata, perjuangan lain dilakukan oleh K. H.

---

<sup>1</sup> Sudiyo, *Pergerakan Nasional Mencapai dan Mempertahankan Kemerdekaan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hlm. 112.

Agus Salim yang lebih memilih untuk berjuang dalam jalur diplomasi. Selama periode 1945-1950 dalam pemerintahan telah beberapa kali terjadi pergantian kabinet, dan dalam kurun waktu tersebut K. H. Agus Salim aktif menjabat sebagai menteri dalam kabinet. Di usianya yang sudah tidak muda lagi, Ia tetap aktif dalam kancah perpolitikan pada waktu itu, bahkan banyak prestasi yang diraihnyanya dalam kancah internasional.

K. H. Agus Salim bukan hanya aktif pada masa setelah kemerdekaan, sebelumnya Ia menjadi tokoh penggerak pada masa pergerakan nasional. Sebagai seorang tokoh besar dalam sejarah, buah pikiran dan perjuangan K. H. Agus Salim banyak dikenal umum. Sedemikian banyak tulisan yang dihasilkan, sedemikian gencar tampak aktifitasnya didalam bidang agama, politik dan jurnalistik. K. H. Agus Salim dilahirkan pada tanggal 8 Oktober 1884 di Kota Gadang, Kabupaten Agam (Bukittinggi), Sumatera Barat, sebuah wilayah yang memang banyak melahirkan tokoh-tokoh intelektual di Indonesia. Ayahnya adalah seorang *Hoofdjaksa* (Jaksa Kepala) di Pengadilan Tinggi Riau dan daerah bawahannya. Karena kedudukan ayahnya tersebut akhirnya K. H. Agus Salim bisa menempuh pendidikan di ELS (*Europeesche Lagere School*) dan HBS (*Hogere Burger School*), Sekolah yang rata-rata muridnya adalah orang-orang Eropa. Tahun 1906 K. H. Agus Salim memilih berangkat ke Jeddah, Arab Saudi, untuk bekerja sebagai Konsulat Belanda sampai tahun 1911. Setahun kemudian tepatnya pada 12 Agustus 1912 K. H. Agus Salim menikah dengan Zainatun Nahar

Almatsier dan dikaruniai 10 Anak. Ia juga mendirikan sekolah HIS (*Hollands Inlandse School*)<sup>2</sup> di kampung halamannya.

Sebelum kemerdekaan Indonesia, K. H. Agus Salim terjun dalam dunia politik dengan masuk menjadi anggota organisasi Sarekat Islam (SI)<sup>3</sup> pada tahun 1915. Sejak masuk Serikat Islam, peran K. H. Agus Salim cukup besar. Ia aktif dengan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Sarekat Islam. Setelah keluar dari Sarekat Islam K. H. Agus Salim aktif dalam pergerakan Penyadar yang didirikannya bersama tokoh seperti Mohamad Roem, Sangaji, Sabirin, dll. Pada masa pendudukan Jepang, K. H. Agus Salim pernah menjadi anggota BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Dan terlibat pula dalam panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar bersama dengan rekan-rekan lainnya yang diketuai oleh Soekarno.

Ketika Indonesia merdeka, K. H. Agus Salim diangkat menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung. Kepandaiannya dalam berdiplomasi membuatnya

---

<sup>2</sup> HIS (*Hollands Inlandse School*) adalah salah satu sekolah yang ada pada masa Hindia-Belanda. Alasan pendirian HIS adalah keinginan dari kalangan orang Indonesia untuk memperoleh pendidikan. Pembukaan HIS juga didukung oleh ekonomi yang meningkat dan perluasan wilayah pemerintahan Belanda diluar Jawa, yang menyebabkan kebutuhan akan pegawai berpendidikan. S Nasution, *Sejarah Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara, 2001, hlm. 119.

<sup>3</sup> Organisasi Sarekat Islam (SI) didirikan pada tahun 1912 oleh H. Samanhudi, seorang pengusaha batik di kampung Lawean, Solo. Pendapat lain mengatakan bahwa Sarekat Islam bermula dari perkumpulan Cina-Jawa, termasuk H. Samanhudi. Pada tahun 1911 ketika terjadi Revolusi Cina, muncul sikap yang merenggangkan hubungan anggota Kong Sing sehingga Kong Sing Jawa mendirikan *Rekso Rumekso* yang kemudian menjadi SI. Tujuan semula SI adalah untuk menghidupkan perekonomian agar mampu bersaing dengan pengusaha asing. Suhartono, *Sejarah Pergerakan Nasional: dari Budi Utomo Sampai Proklamasi 1908-1945*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1994, hlm. 33.

dipercaya sebagai Menteri Muda Luar Negeri dalam kabinet Syahrir II dan kabinet Syahrir III. Selanjutnya Ia menjabat sebagai Menteri Luar Negeri dalam kabinet Amir Sjarifudin I, II dan kabinet Hatta I, II. Sesudah pengakuan kedaulatan oleh pihak Belanda, K. H. Agus Salim ditunjuk sebagai penasihat Menteri Luar Negeri. Ketika para pejuang lainnya sedang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari ancaman kembalinya Belanda, K. H. Agus Salim pergi ke luar negeri, berjuang dalam kancah internasional agar negara lain mau mengakui kedaulatan Indonesia. Dengan tekad membara, bahwa kemerdekaan Indonesia harus dipertahankan dan diketahui dunia, K. H. Agus Salim giat mengunjungi berbagai negara demi mendapat pengakuan atas kedaulatan Indonesia. K. H. Agus Salim ditunjuk sebagai ketua misi diplomatik Republik Indonesia untuk negara-negara Islam di Timur Tengah.

Perjuangan diplomasi K. H. Agus Salim juga terlihat saat menyertai Sutan Syahrir dalam Sidang Dewan Keamanan PBB untuk meminta dukungan PBB dalam membantu masalah Indonesia-Belanda sehubungan dengan dilancarkannya Agresi Militer I Belanda. Akhirnya Dewan Keamanan PBB menyerukan agar diadakan gencatan senjata dan dibentuklah KTN. Tidak puas dengan Agresi Militer Belanda I, Belanda kemudian melancarkan kembali serangannya dalam Agresi Militer Belanda II, pada waktu itu K. H. Agus Salim bersama sejumlah tokoh negara di tawan Belanda dan mereka dibebaskan dari pengasingan pada tahun 1949 setelah diadakan perjanjian Roem-Royen. Ketika diadakan Konferensi Meja Bundar, K. H. Agus Salim turut serta mendampingi para delegasi Indonesia yang diketuai oleh Mohammad Hatta. K. H. Agus Salim dikenal sebagai “*The*

*Grand Old Man*”, yang berarti Orang Tua Besar. Julukan tersebut diberikan sebagai bentuk penghargaan atas peranan dan kontribusi K. H. Agus Salim yang besar bagi bangsa Indonesia pada waktu itu.

## **B. Latar Belakang Kehidupan K. H. Agus Salim**

K. H. Agus Salim adalah putra dari Sutan Mohammad Salim dan Siti Zainab. Ia dilahirkan pada tanggal 8 Oktober 1884 di Kota Gadang, Kabupaten Agam (Bukittinggi), Sumatera Barat, sebuah wilayah yang memang banyak melahirkan tokoh-tokoh intelektual di Indonesia. K. H. Agus Salim merupakan salah satu dari sederet tokoh kelahiran Minangkabau yang sukses menjejakkan nama dan jasa dalam perjalanan sejarah bagi bangsa Indonesia, khususnya pada masa pergerakan nasional dan setelah kemerdekaan. Ayahnya adalah seorang *Hoofdjaksa* (Jaksa Kepala) di Pengadilan Tinggi Riau dan daerah bawahannya. Kedudukan Ayahnya sebagai *Hoofdjaksa* bagi penduduk pribumi termasuk berkelas dan terhormat. Inilah sebabnya K. H. Agus Salim bisa menempuh pendidikan di ELS (*Europeesche Lagere School*), yang menurut kebiasaan hanya menerima anak-anak keturunan Eropa saja.<sup>4</sup> Setelah menamatkan studi di ELS, Ia melanjutkan studinya di HBS (*Hogere Burger School*), sekolah yang juga rata-rata adalah anak-anak Eropa.

Selama menempuh pendidikan di ELS dan HBS K. H. Agus salim menjadi populer dikalangan teman-temannya karena kepandaian dan prestasinya

---

<sup>4</sup> Hazil Tanzil, *Seratus Tahun Haji Agus Salim*. Jakarta: Sinar Harapan, 1984, hlm. 36.

disekolah. Sejak kecil Ia memang dikenal sebagai seorang yang cerdas, bahkan diusianya yang muda telah mampu menguasai beberapa bahasa asing seperti: Belanda, Inggris, Arab, Turki, Perancis, Jepang, Jerman, dan Spanyol. Karena kedudukan ayahnya pula, akhirnya K. H. Agus Salim berhasil mendapatkan persamaan status sama dengan orang Eropa, atau istilahnya mendapatkan status *gelijkgesteld* yang pada waktu itu sangat mustahil bagi orang pribumi seperti yang dapat memperoleh status tersebut. Dilihat dari latar belakang keluarganya, dapat dikatakan bahwa keluarga K. H. Agus Salim adalah keluarga yang terpandang.

Setelah lulus HBS, K. H. Agus Salim sebenarnya ingin melanjutkan studi kedokteran di Belanda, namun kandas karena tidak ada biaya. Berbagai upaya dilakukan, diantaranya dengan mengajukan beasiswa namun tetap gagal mendapatkan beasiswa. Tahun 1906 K. H. Agus Salim memutuskan berangkat ke Jeddah, Arab Saudi, untuk bekerja sebagai Konsulat Belanda sampai tahun 1911. Sepulang dari Jeddah pada tahun 1911, setahun kemudian tepatnya pada 12 Agustus 1912 K. H. Agus Salim menikah dengan Zainatun Nahar Almatsier dan kemudian dikaruniai 10 anak yang menambah lengkap keluarga mereka. Dari 10 anaknya tersebut, 2 meninggal ketika masih kecil, dan 1 meninggal dalam pertempuran di Lengkong sebagai pemuda harapan bangsa.

Ada beberapa ciri khas K. H. Agus Salim dan Zainatun Nahar Almatsier dalam mengurus anak-anaknya. Pertama, sejak kecil anak-anaknya sudah diajarkan bahasa Belanda, sehingga bahasa Belanda dijadikan sebagai bahasa keseharian mereka. Ciri khas yang kedua yaitu bahwa K. H. Agus Salim tidak mau menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah Belanda atau di sekolah manapun

pada waktu itu. Bersama dengan istri, Ia mengajari anak-anak mereka sendiri. K. H. Agus Salim mempunyai alasan tersendiri mengapa Ia tak menyekolahkan anak-anaknya dalam pendidikan formal. K. H. Agus Salim menerangkan bahwa Ia sendiri telah mengalami jalan “berlumpur” akibat mendapat pendidikan sekolah Belanda dari ELS sampai HBS serta bekerja sebagai pegawai pemerintah Belanda, sehingga Ia tak tega jika anak-anaknya melalui jalan serupa. Dari alasan tersebut itulah muncul keinginan untuk memberi pelajaran sendiri kepada anak-anaknya.

Pelajaran membaca, menulis dan berhitung diberikannya secara santai seakan-akan sambil bermain namun mampu membuat mereka pada umur 5-6 tahun telah bisa membaca dan menulis.<sup>5</sup> Begitu anak-anaknya telah bisa membaca, yang dianjurkan setelahnya adalah agar mereka banyak membaca buku yang telah disediakan oleh K. H. Agus Salim untuk anak-anaknya. Dalam memberikan pendidikan bagi anak-anaknya, tidak pernah Ia memberikan pelajaran dengan suatu aturan. Antara jam belajar dan jam bermain-main tidak ada batasnya, artinya setiap saat bersama dengan anaknya, disaat itu pula Ia memberi pelajaran dan itu sudah dimulai saat anaknya lahir. Begitulah sikap K. H. Agus Salim dalam mendidik Anak-anaknya.<sup>6</sup> Banyak orang yang merasa heran mengapa anak-anak K. H. Agus Salim yang tidak bersekolah tersebut pandai berbahasa Belanda dengan baik dan lancar.

---

<sup>5</sup> Hazil Tanzil, *ibid.*, hlm. 54.

<sup>6</sup> Mohamad Roem, “*Pemimpin Adalah Menderita: Kesaksian Haji Agus Salim*”. dalam Taufik Abdullah, Aswab Mahasin, Daniel Dhakidae (ed), *Manusia Dalam Kemelut Sejarah*. Jakarta: LP3ES, 1978, hlm. 113.



Sebagai pemikir agama dan politik, K. H. Agus Salim memiliki bakat mengarang. Banyak karya yang dituangkannya melalui tulisan. Setelah masuk pergerakan nasional, terlebih setelah menjadi pemimpin pergerakan, K. H. Agus Salim merasa perlu untuk menyebar luaskan pikiran-pikirannya kepada khalayak sehingga secara gencar Ia menyampaikan berbagai gagasan-gagasannya itu melalui tulisan dimana tulisan-tulisannya tersebut telah mampu menarik minat masyarakat Indonesia. Karangan dan buah karyanya tidak hanya tersebar diberbagai surat kabar dan majalah, tetapi banyak pula hasil karya K. H. Agus Salim yang berbentuk buku atau risalah. Ia tidak hanya menulis tentang isu-isu politik dan agama, tetapi juga soal filsafat, sejarah, hukum, astronomi, pendidikan, sosial dan ekonomi.

### **C. K. H. Agus Salim dalam Kancah Perpolitikan Indonesia Masa Revolusi Fisik (1945-1950)**

K. H. Agus Salim sebagai salah satu tokoh yang pada masa sebelum kemerdekaan memiliki peranan penting dan ikut berjuang untuk kemerdekaan Indonesia, pada masa setelah kemerdekaan Ia kembali menunjukkan eksistensinya dengan masuk dalam pemerintahan RI. Setelah proklamasi kemerdekaan, terbentuklah kabinet presidensial dibawah pimpinan presiden Soekarno. Pada waktu itu K. H. Agus Salim memang tidak duduk dalam kabinet, namun setelah Dewan Pertimbangan Agung dibentuk, Ia terpilih sebagai anggota.<sup>7</sup> Dalam sistem

---

<sup>7</sup> Solichin Salam, *Hadji Agus Salim: Hidup dan Perjuangannya*. Jakarta: Djaja Murni, 1961, hlm. 135-136.

kabinet presidential, fungsi dan kedudukan presiden sangat sentral karena disamping berfungsi sebagai kepala negara Ia juga berfungsi sebagai kepala pemerintahan. Kedua peran tersebut membawa konsekuensi tanggung jawab yang berat. Menyadari tanggung jawab presiden yang seperti itu, maka UUD 1945 menyiapkan suatu lembaga yang akan memberikan berbagai pertimbangan yang obyektif dan bijaksana yang berdiri diluar kegiatan penyelenggaraan pemerintah.<sup>8</sup> Lembaga tersebut kemudian dikenal dengan Dewan Pertimbangan Agung diamana dalam ketatanegaraan menurut UUD 1945, Dewan Pertimbangan Agung termasuk salah satu dari lembaga-lembaga tinggi negara<sup>9</sup>.

Dewan Pertimbangan Agung atau yang sering disingkat dengan DPA merupakan sebuah lembaga negara yang dibentuk pada tanggal 25 September 1945. Susunannya ditentukan dengan undang-undang pasal 16 ayat 1 dan tugasnya menurut pasal 16 ayat 2 konstitusi sendiri adalah memberi jawab atas pertanyaan presiden dan berhak mengajukan usul kepada pemerintah.<sup>10</sup> Sebagai lembaga Konstitusional, pada masa awal tidak banyak yang dikerjakan oleh Dewan Pertimbangan Agung ini. Terlebih ketika sistem pemerintahan berubah menjadi kabinet parlementer, keberadaan Dewan Pertimbangan Agung menjadi

---

<sup>8</sup> Musthafa Kamal Pasha, *Pancasila, UUD 1945 dan Mekanisme Pelaksanaannya*. Yogyakarta: Mitra Gama Widya, 1988, hlm. 131.

<sup>9</sup> Selain Dewan Pertimbangan Agung, lembaga-lembaga tertinggi lainnya yang ada di Indonesia sesuai dengan UUD 1945 adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat, Presiden dan wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Moh. Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 1993, hlm. 119.

<sup>10</sup> G. J. Wolhoff, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negera Republik Indonesia*. Makasar: Timun Mas N.V, 1955, hlm. 70.

tidak begitu berarti. Selama periode revolusi fisik sampai tahun 1949, tidak banyak yang dapat dinilai mengenai keberadaan lembaga Dewan Pertimbangan Agung ini. Apalagi di bawah Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950, memang tidak dikenal adanya lembaga Dewan Pertimbangan Agung.

Perubahan sistem pemerintahan dari kabinet presidensial menjadi kabinet parlementer mengakibatkan berdirinya kabinet parlementer pertama dibawah pimpinan Sutan Syahrir. Tiga kali berturut-turut Sutan syahrir memegang kursi pemerintahan yaitu dalam kabinet Syahrir I, II, dan III. Pada masa kabinet Syahrir I, K. H. Agus Salim belum masuk menjadi anggota kabinet. Keanggotaannya dalam kabinet dimulai pada masa kabinet Syahrir II yang dibentuk 3 Maret 1946 dengan menempati posisi sebagai Menteri Muda Luar Negeri dan bertugas mendampingi Sutan Syahrir selaku Perdana Menteri yang merangkap pula sebagai Menteri Luar Negeri. Kedudukan K. H. Agus Salim sebagai Menteri Muda Luar Negeri berlanjut hingga kabinet Syahrir III. Pada masa Kabinet Syahrir III ini, prestasi luar biasa diraih berkat peranan K. H. Agus Salim dengan misinya ke negara-negara Timur Tengah. Sebelumnya K. H Agus Salim juga ikut dalam Konferensi Antara Asia (*Inter Asian Conference*) yang diadakan di New Delhi, India sebagai salah satu anggota wakil dari delegasi Indonesia.

Setelah berakhirnya kabinet Syahrir III, dibentuk kabinet baru dengan nama kabinet Amir Syarifuddin. K. H. Agus Salim menjabat sebagai Menteri Luar Negeri berturut-turut selama dua kali periode yaitu pada kabinet Amir Syarifuddin I dan II. Pada masa kabinet Amir Syarifuddin I, Belanda melancarkan Agresinya yang pertama pada tanggal 21 Juli 1947. Walaupun Belanda berhasil menduduki

kota-kota, tetapi pasukan kita tetap melakukan perang gerilya menggempur kota-kota itu, sehingga tentara Belanda menderita kerugian.<sup>11</sup> Pada waktu itu K. H. Agus Salim bersama dengan Sutan Syahrir atas nama bangsa Indonesia menghadap Dewan Keamanan PBB<sup>12</sup> untuk memprotes tindakan Belanda tersebut hingga pada akhirnya usaha K. H. Agus Salim membuahkan hasil karena PBB bersedia untuk membantu dalam penyelesaian masalah Indonesia dengan Belanda. Setelah diadakan reshuffle kabinet pada tanggal 11 November 1947, terbentuk kabinet Amir Syarifuddin II dengan masuknya Masyumi dalam formasi kabinet. Melalui usaha yang telah dilakukan oleh K. H. Agus Salim pada masa kabinet Amir Syarifuddin I yaitu meminta bantuan Dewan Keamanan PBB dalam menyelesaikan masalah Indonesia, pada masa kabinet Amir Syarifudin II ini KTN datang ke Indonesia untuk membahas tentang akan diadakannya perundingan antara pihak Indonesia dengan Belanda dibawah pengawasan KTN. Perundingan ini akhirnya berhasil dimulai tanggal 8 Desember 1947 diatas kapal Renville yang berlabuh di teluk Jakarta.

---

<sup>11</sup> Bambang Gunardjo, dkk, *Buku Pantja Windhu Kebangkitan Perjuangan Pemuda Indonesia*. DJakarta: Jajasan Kesedjahteraan Keluarga Pemuda 66, 1970, hlm. 90.

<sup>12</sup> Dewan Keamanan PBB adalah salah satu dari enam organ utama PBB. Negera anggota PBB telah memberikan tanggung jawab utama kepada Dewan untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Dewan juga diberi wewenang dalam menangani sengketa. Jika semua pihak yang bersengketa menghendakinya, Dewan dapat membuat rekomendasi atau anjuran kepada para pihak dengan tujuan untuk mencapai penyelesaian sengketa secara damai. Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 98-100.

Kabinet Hatta adalah kabinet pengganti dari kabinet sebelumnya yaitu Kabinet Amir Syarifuddin. Berturut-turut Mohammad Hatta memegang kursi pemerintahan yaitu dalam kabinet Hatta I, II, dan III (kabinet RIS). Dalam Kabinet ini K. H. Agus Salim masih dipercaya untuk menjabat sebagai Menteri Luar Negeri berturut-turut pada Kabinet Hatta I dan II. Pada masa kabinet Hatta I, tepatnya tanggal 19 Desember 1948 Belanda melancarkan Agresi Militernya yang ke-II dengan menyerbu kota Yogyakarta. Dalam Agresi Mileter ke-II tersebut, K. H. Agus Salim berhasil ditangkap dan diasingkan oleh Belanda bersama dengan para pemimpin negara lainnya. Atas dukungan dari berbagai negara termasuk dukungan PBB akhirnya belanda bersedia mengadakan perundingan dengan pihak Indonesia dan diadakanlah perjanjian Roem-Royen yang isinya antara lain membebaskan pemimpin-pemimpin Indonesia yang telah ditangkap belanda. Pada tanggal 4 Agustus 1949 diadakan resuffle kabinet setelah dilanda perang dan kemudian diganti dengan kabinet Hatta II. Pada masa kabinet Hatta II ini K. H. Agus Salim yang masih menjabat sebagai Menteri Luar Negeri ikut menghadiri Konferensi Meja Bundar yang diadakan di Den Haag, Belanda.

Setelah pengakuan kedaulatan Indonesia oleh pihak Belanda, K. H. Agus Salim meletakkan jabatannya sebagai Menteri Luar Negeri mengingat usianya yang semakin lanjut. Setelah terbentuknya Kabinet RIS, K. H. Agus Salim tidak lagi menduduki jabatan eksekutif lagi. K. H. Agus Salim kemudian ditunjuk sebagai penasihat istimewa Mohammad Hatta pada kementerian luar negeri. Pada waktu itu Ia ikut pula mengurus masalah Irian Barat, yang setelah KMB tetap merupakan masalah yang belum terselesaikan. Penunjukannya sebagai penasihat

Menteri Luar Negeri ini didasarkan pada banyaknya pengalaman yang telah didapatnya terutama pengalamannya semasa menjabat sebagai Menteri Muda Luar Negeri maupun Menteri Luar Negeri pada pemerintahan Indonesia. Prestasi-prestasi yang pernah di raihnya, terutama keberhasilannya untuk membawa bangsa Indonesia ke dunia internasional juga menjadi salah satu pertimbangan. Dengan berkaca pada banyaknya pengalaman K.H. Agus Salim ini, maka tidak ada keraguan lagi ketika menunjuknya sebagai penasihat Menteri Luar Negeri.

#### **D. Usaha Perjuangan Diplomasi K. H. Agus Salim**

Pada masa setelah kemerdekaan, K. H. Agus Salim terkenal sebagai seorang diplomat ulung. Sebagai seorang diplomat Ia layak nya pejuang-pejuang yang lain berusaha sekuat tenaga berjuang untuk bangsa Indonesia. K. H. Agus Salim adalah salah satu tokoh yang pandai dalam hal berbicara. Beberapa tokoh seperti Mohammad Roem merasa senang jika sedang bercakap-cakap atau hanya sekedar mendengarkan K. H. Agus Salim berbicara. Caranya menerangkan sesuatu sangat menarik. Anggapan serupa juga dituturkan oleh Prof. Schermerhorn. Menurutnya, bercakap-cakap dengan K. H. Agus Salim tidaklah sangat sulit, karena Ia tidak merasa keberatan jika bercakap-cakap sendiri.<sup>13</sup> Melalui kepiawaiannya dalam berdiplomasi banyak prestasi yang telah diraih oleh K. H. Agus Salim. Berbagai usaha diplomasi yang dilakukan oleh K. H. Agus Salim antara lain sebagai berikut.

---

<sup>13</sup> Mohamad Roem, *Bunga Rampai Dari Sejarah*. Djakarta: Bulan Bintang, 1972, hlm. 213.

## 1. Dalam Meja Perundingan

Ketika diadakan perundingan yang pertama, Inggris mengirimkan Lord Killearn, seorang diplomat ulung untuk membantu bangsa Indonesia dan Belanda mencapai suatu persetujuan. Pada waktu itu Bangsa Indonesia baru menginjakkan kaki dalam dunia diplomasi. Mereka menemukan seorang tokoh seperti K. H. Agus Salim yang mahir dalam beberapa bahasa, bercakap-cakap dengan diplomat-diplomat tingkat atas, seolah-olah diplomasi bagi bangsa Indonesia suatu pekerjaan yang juga sudah dijalankan berabad-abad.<sup>14</sup> K. H. Agus Salim adalah salah satu orang yang sangat di segani dan dihormati dikalangan Inggris pada waktu itu. Ketika diadakan perundingan Linggarjati K. H. Agus Salim didaulat menjadi penasihat dan menjadi orang kedua disamping Sutan Syahrir. K. H. Agus salim memang tidak ikut langsung dalam perundingan, akan tetapi dalam hubungan dengan anggota delegasi dari pihak Belanda maupun Inggris, Ia sebagai *Lobbyist* mendapat penghargaan.<sup>15</sup>

Dalam perundingan Renville, K. H. Agus Salim masuk sebagai anggota delegasi Indonesia dengan beberapa anggota lainnya seperti Mr. Amir Syarifuddin, Mr. Ali Sastroamijoyo, Dr. Tjoa Sik Ien, Sutan Syahrir, Mr. Nasrun, Ir. Juanda, Drs. Setyadjid. Perundingan ini akhirnya berhasil dimulai pada tanggal 8 Desember 1947 diatas kapal perang renville dan

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 218.

<sup>15</sup> Mohamad Roem, “ *Pemimpin Adalah Menderita: Kesaksian Haji Agus Salim*”. dalam Taufik Abdullah, Aswab Mahasin, Daniel Dhakidae (ed), *Manusia Dalam Kemelut Sejarah*. Jakarta: LP3ES, 1978, hlm. 128.

berakhir pada tanggal 17 Januari 1948, dan menghasilkan perjanjian Renville yang ditandatangani oleh Abdul Kadir Wijoyoatmojo sebagai wakil Belanda sedangkan Indonesia diwakili oleh Amr Syarifuddin.

Selain dalam perundingan Linggarjati dan Renville, K. H. Agus Salim juga ikut berjuang dalam Konferensi Meja Bundar mendampingi Mohamad Hatta yang ditunjuk sebagai ketua delegasi Indonesia. Konferensi Meja Bundar adalah konferensi segitiga antara delegasi Belanda, Republik Indonesia dan BFO. Sebelum Konferensi Meja Bundar berlangsung, diadakan pendekatan dan koordinasi dengan BFO terutama dalam hubungan dengan pembentukan Republik Indonesia Serikat maupun untuk menciptakan suatu front menghadapi Belanda. Perang gerilya oleh TNI dan rakyat yang sangat meningkat setelah Agresi militer Belanda II itu telah menyadarkan pemimpin-pemimpin BFO bahwa bagaimanapun Belanda tidak dapat berkuasa lagi di Indonesia.

Karena BFO dan Republik Indonesia telah bersatu maka Belanda kini hanya menghadapi delegasi Indonesia.<sup>16</sup> Delegasi Indonesia dibawah pimpinan Mohamad Hatta berjuang dalam meja perundingan, hingga pada akhirnya melalui Konferensi Meja Bundar yang diadakan di Den Haag, Belanda memberikan pengakuan kedaulatan kepada Indonesia. Dalam KMB ini K. H. Agus Salim tetap menunjukkan sikapnya sebagai putra bangsa untuk

---

<sup>16</sup> Mukayat, *Haji Agus Salim: The Grand Old Man Of Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1981/1982, hlm. 81.



selalu berjuang demi membela bangsa Indonesia. Meskipun fisiknya yang sudah lemah, namun jasa-jasa baiknya tetap dibutuhkan. Perundingan dengan Belanda sejak proklamasi kemerdekaan RI telah berperan besar dalam dunia diplomasi Republik Indonesia.<sup>17</sup> Hingga pada puncaknya Indonesia berhasil mendapat pengakuan dari Belanda dan dunia internasional.

## 2. Menghadiri *Inter Asian Conference* di New Delhi, India

Bulan Maret 1947 di New Delhi, India diadakan *Inter Asian Conference*. Pada waktu itu pemerintah Indonesia diundang untuk turut hadir sehingga Sutan Syahrir bersama dengan delegasi Indonesia lainnya termasuk K. H. Agus Salim turut serta dalam konferensi tersebut. Jawaharlal Nehru menerangkan bahwa maksud dari *Inter Asian Conference* ini adalah membicarakan masalah kebudayaan, sosial, dan ekonomi.<sup>18</sup> Meskipun bukan konferensi politik, namun wakil delegasi Indonesia berhasil memberikan gambaran tentang bagaimana perjuangan bangsa Indonesia untuk memperoleh kemerdekaannya.

Sosoknya K. H. Agus Salim yang aktif dan suka bergaul dengan siapa saja menjadi perhatian masyarakat India, sehingga kemanapun Ia pergi selalu dikerumuni oleh orang banyak. Selama berada di New Delhi sampai akhir konferensi tanggal 1 April 1947, K. H. Agus Salim aktif bertemu dan bertukar pikiran dengan pemimpin-pemimpin India seperti Pandit Jawaharlal

---

<sup>17</sup> Kustiniyati Mochtar, *Diplomasi Ujung Tombak Perjuangan RI: Kumpulan Karangan Mohamad Roem*. Jakarta: Gramedia, 1989, hlm. 3.

<sup>18</sup> Mohamad Bondan, *Genderang Proklamasi di Luar Negeri*. Djakarta: Kawal, 1971, hlm. 89.

Nehru dan Muhammad Ali Jinnah. K. H. Agus Salim juga menghadiri *Garden Parties* yang diselenggarakan oleh pemimpin-pemimpin Indian National Kongres dan All-India Muslim League. Setelah kunjungan ke New Delhi hubungan Indonesia dan India semakin ditingkatkan. India juga terus mendukung perjuangan Indonesia. Berturut-turut pada tanggal 28 dan 29 Agustus 1947 pesawat India tiba di Yogyakarta membawa obat-obatan dan tiga orang dokter yang secara sukarela membantu perjuangan rakyat Indonesia. India juga terus membantu perjuangan diplomasi di forum internasional.<sup>19</sup>

### 3. Misi Diplomasi ke Negara-Negara Timur Tengah.

Hubungan politik dan diplomatik juga dilakukan kenegara-negara Arab. Pada waktu itu K. H. Agus Salim ditunjuk sebagai ketua delegasi untuk misi Indonesia ke negara-negara Timur Tengah. Penunjukannya sebagai ketua juga tak lepas dari pengetahuan politiknya yang luas mengenai negara-negara Arab dan Timur Tengah. Tujuan awal dari delegasi tersebut adalah Mesir. Mesir akhirnya mau mengakui kedaulatan Indonesia secara *de facto* dan *de jure*, selanjutnya diadakanlah perjanjian persahabatan antara Mesir dan Indonesia pada tanggal 10 Juni 1947. Perjanjian tersebut terdiri dari lima pasal dan ditulis dalam tiga bahasa, yaitu bahasa Perancis, Arab, dan Indonesia. Selain perjanjian persahabatan tersebut, Mesir juga mengadakan perjanjian perdagangan dengan pihak Indonesia.

---

<sup>19</sup>Ginandjar Kartasasmita, dkk, *30 Tahun Indonesia Merdeka: 1945-1955*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1997, hlm. 170.

Sebelumnya Mesir pernah mengirimkan utusan resmi ke Indonesia yaitu Mohammad Abdul Mun'im dengan menumpang pesawat khusus dan berhasil tiba di Yogyakarta tanggal 13-16 Maret 1947 meskipun pada waktu itu ada blokade ketat dari Belanda terhadap Indonesia. Mohammad Abdul mun'im adalah konsul jenderal Mesir di Bombay, yang bertindak atas nama Raja Farouk dari Mesir, menyampaikan keputusan Dewan Gabungan Negara-Negara Arab (Liga Arab) yang berisi anjuran kepada Liga Arab untuk mengakui Republik Indonesia. Keputusan tersebut disampaikan kepada presiden Soekarno dalam pertemuan di Yogyakarta pada tanggal 14 Maret 1947.<sup>20</sup> Sebagai kelanjutan dari kedatangan utusan Mesir itu, maka berangkatlah sebuah misi resmi yang pertama kalinya dikirim oleh Republik Indonesia ke negara-negara Arab yang diketuai oleh K. H. Agus Salim. Delegasi berangkat pada tanggal 16 Maret 1947 ke Bombay dan setelah mengadakan persiapan di Bombay meneruskan perjalanan ke Mesir.<sup>21</sup>

Mesir adalah negara pertama yang mengakui Republik Indonesia secara *de jure*.<sup>22</sup> Setelah Mesir mengakui kedaulatan Indonesia negara-negara Arab lainnya yang mengakui Indonesia antara lain: Suriah, Yaman, Saudi

---

<sup>20</sup> Ginandjar Kartasasmita, dkk, *op.cit.*, hlm. 149.

<sup>21</sup> H.M Rasyidi, *Negara-negara Arablah yang Pertama Mengakui Kemerdekan Bangsa Indonesia*. Dalam "Sekitar Perjanjian Persahabatan Indonesia-Mesir Tahun 1947. Jakarta: Panitia Peringatan Hut ke-32 Perjanjian Persahabatan Indonesia-Mesir, 1978, hlm. 22.

<sup>22</sup> Achmad soebardjo, *Selayang Pandang Tentang Peristiwa Penting dalam Sejarah*. Dalam "Sekitar Perjanjian Persahabatan Indonesia-Mesir Tahun 1947". Jakarta: Panitia Peringatan Hut ke-32 Perjanjian Persahabatan Indonesia-Mesir, 1978, hlm. 17.

Arabia, Irak. Dapat disimpulkan bahwa usaha dari K. H. Agus Salim dalam merangkul negara-negara Arab agar mau mengakui negara Indonesia sebagai suatu negara yang berdaulat merupakan sebuah keberhasilan yang luar biasa dan merupakan tonggak sejarah diplomasi dalam hubungan luar negeri Indonesia.

K. H. Agus Salim sebagai Menteri Muda dalam kabinet Syahrir memang secara gencar memperkenalkan Indonesia ke dunia luar. Dan ketika ada pergantian kabinet Syahrir ke kabinet Amir Syarifuddin, dari Timur Tengah, K. H. Agus Salim tidak kembali ke tanah air, namun meneruskan misinya keberbagai negara dalam kedudukannya sebagai Menteri Luar Negeri.<sup>23</sup> Setelah beberapa negara mengakui kedaulatan Indonesia, negara-negara tersebut tidak hanya mengakui kedaulatan Indonesia saja tetapi juga memberikan bantuan kepada Indonesia yang masih terus berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan dari ancaman Belanda. Misalnya saja Mesir sebagai negara yang paling dahulu mengakui RI, pada tanggal 5 Maret 1948 memberikan bantuan obat-obatan yang sangat dibutuhkan oleh rakyat Indonesia yang sedang berjuang.

#### 4. Menghadap Dewan Keamanan PBB

Ketika terjadi Agresi Militer Belanda I, K. H. Agus Salim bersama dengan Sutan Syahrir menghadap Dewan Keamanan PBB untuk meminta dukungan mengenai masalah Indonesia dan Belanda. Berbagai usaha yang dilakukan oleh K. H. Agus Salim dan juga Sutan Syahrir membuahkan hasil.

---

<sup>23</sup> Kustiniyati Mochtar, *op.cit.*, hlm. 4.

Akhirnya PBB bersedia memberikan dukungan bagi Bangsa Indonesia. Dewan keamanan PBB menyerukan agar diadakan gencatan senjata, dan dibentuklah Komisi Tiga Negara (KTN) yang terdiri dari Belgia, Australia, Amerika. Setelah anggota KTN datang ke Indonesia, diputuskan akan diadakan perundingan Renville. Perundingan ini berlangsung tanggal 8 Desember 1947-17 Januari 1948. Hasil perundingan tersebut tidak membawa kebahagiaan bagi Indonesia namun demikian keputusan PBB untuk ikut serta dalam menyelesaikan masalah Indonesia merupakan suatu kemenangan diplomatik bagi pihak Indonesia.

Ketika terjadi Agresi Militer Belanda II, serangan mendadak Belanda akhirnya berhasil menguasai Yogyakarta. Para pemimpin negara yang sedang membicarakan situasi politik di istana presiden akhirnya berhasil ditangkap oleh Belanda. Dalam situasi yang genting itu, presiden Soekarno memerintahkan kepada Menteri Kemakmuran RI Syafrudin Prawiranegara untuk membentuk pemerintahan darurat karena Mr. Syafrudin berada di Sumatera.<sup>24</sup> Berkaitan dengan Agresi Militer tersebut, bantuan dari PBB Terus berlanjut. Amerika Serikat mengancam akan menghentikan bantuan keuangan kepada Belanda, sedangkan negara-negara bagian berpaling kepada Indonesia dari Belanda.

Pemerintah Amerika Serikat dengan gigih menentang aksi tersebut, dan atas prakarsa Dewan Keamanan PBB diadakanlah sidang untuk mengancam

---

<sup>24</sup> Purn R. H. A Hidayat, dkk, *Indonesia Menyongsong Era Kebangkitan Nasional Kedua*. Jakarta: Yayasan Veteran RI, 1992, hlm. 135

tindak Agresi Belanda tersebut. Melalui dukungan Dewan Keamanan PBB dan juga dukungan negara-negara Timur Tengah akhirnya berhasil mendesak Belanda untuk mengadakan perundingan dengan pihak Indonesia yang kemudian perundingan tersebut dikenal dengan perundingan Roem-Royen. Sebagai hasil dari perundingan tersebut yaitu mengembalikan Yogyakarta ketangan Indonesia serta membebaskan para pemimpin negara yang ditawan oleh Belanda seperti Soekarno, K. H. Agus Salim, Sutan Syahrir, Mohamad Hatta, Mohamad Roem, Mr. A. G. Pringgodigdo, Mr. Asaat dan Suryadharma.

Selanjutnya pada tanggal 23 Agustus 1949 lahir Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda. Konferensi Meja Bundar ini diadakan atas usul pemerintah Belanda yang bertindak sebagai tuan rumah, sehingga jabatan ketua dipegang oleh seorang pembesar Belanda.<sup>25</sup> Namun demikian wewenang komisi PBB untuk Indonesia tetaplah sama. Ia bertugas untuk membantu pihak-pihak yang bersangkutan agar tercapai kata sepakat. Disini jelas bahwa peran PBB dalam Konferensi Meja Bundar tidaklah pasif. Keberhasilan dalam KMB tentunya juga tak lepas dari peran PBB yang berusaha untuk ikut membantu penyelesaian masalah Indonesia dan Belanda. Alhasil, melalui perjanjian KMB, Belanda bersedia mengakui kedaulatan Indonesia. Usaha K. H. Agus Salim untuk meminta dukungan PBB telah terbukti membuahkan hasil.

---

<sup>25</sup> Ide Anak Agung Gde Agung, *Renville*. Jakarta: Sinar Harapan, 1983, hlm. 287-289.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar Loebis. (1992), *Kilas Balik Revolusi: Kenangan, Pelaku dan Saksi*. Jakarta: UI-Press.
- A. H. Nasution. (1979). *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid 5 Periode Agresi Militer Belanda I*. Bandung: Angkasa.
- . (1979). *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid 11 Periode Konverensi Meja Bundar*. Bandung: Angkasa.
- A. K. Pringgodigdo. (1994). *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Anwar Haryono, dkk. (1978). *Mohamad Roem 70 Tahun: Pejuang-Perunding*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Bambang Gunardjo, dkk. (1970). *Buku Pantja Windhu Kebangkitan Perjuangan Pemuda Indonesia*. Djakarta: Jajasan Kesedjahteraan Keluarga Pemuda 66.
- Bibit Suprpto. (1985). *Perkembangan Kabinet dan Pemerintahan di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Cahyo Budi Utomo. (1995). *Dinamika Pergerakan Kebangsaan Indonesia dari Kebangkitan Hingga Kemerdekaan*. Semarang: IKIP Semarang Press.
- C. S. T. Kansil. (1983). *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru.
- Deliar Noer. (1982). *Gerakan Moderen Islam di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1977/1978). *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Sumatera Barat*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Elizabeth E. Graves. (2007). *Asal-Usul Elit Minangkabau Modern: Respons Terhadap Kolonial Belanda Abad XIX/XX*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Floriberta Aning S, dkk. (2005). *100 Tokoh yang Mengubah Indonesia: Biografi Seratus Tokoh Paling Berpengaruh dalam Sejarah Indonesia di Abad 20*. Yogyakarta: Narasi.
- Ginandjar Kartasasmita, dkk. (1997). *30 Tahun Indonesia Merdeka: 1945-1955*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

- G. Moedjanto. (1991). *Indonesia Abad ke-20 Jilid 2: Dari Perang Kemerdekaan Pertama Sampai Pelita III*. Yogyakarta : Kanisius.
- Hazil Tanzil. (1984). *Seratus Tahun Haji Agus Salim*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Huala Adolf. (2004). *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hugino dan P. K. Poerwantara. (1992). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Jakarta: UI Press.
- Ide Anak Agung Gde Agung. (1983). *Renville*. Jakarta: Sinar Harapan.
- J. B. Soedaranta. (2007). *Jejak-Jejak Pahlawan Perikat Persatuan Bangsa*. Jakarta: Grasindo.
- K. M. L. Tobing. (1986). *Perjuangan Politik Bangsa Indonesia Linggarjati*. Jakarta: Gunung Agung.
- Kustiniyati Mochtar. (1989). *Diplomasi Ujung Tombak Perjuangan RI: Kumpulan Karangan Mohamad Roem*. Jakarta: Gramedia.
- M. Bibit Suprpto. (2009). *Ensiklopedi Ulama Indonesia*. Jakarta: Gelegar Media Indonesia.
- Mohamad Bondan. (1971). *Genderang Proklamasi di Luar Negeri*. Djakarta: Kawal.
- Mohamad Roem. dkk. (1954). *Jejak Langkah Haji Agus Salim: Pilihan Karangan, Ucapan dan Pendapat Beliau Dulu Sampai Sekarang*. Jakarta: Tintamas.
- (1972). *Bunga Rampai Dari Sedjarah*. DJakarta: Bulan Bintang.
- Moh Mahfud MD. (1993). *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- M. Rasjid Manggis Dt Radjo Panghoeloe. (1982). *Minangkabau Sejarah Ringkas dan Adatnya*. Jakarta: Mutiara.
- Mukayat. (1981/1982). *Haji Agus Salim: The Grand Old Man Of Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Nugroho Notosusanto, dkk. (1993). *Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.



- Panitia Peringatan Hut ke 32 Perjanjian Persahabatan Indonesia-Mesir. (1978). *Sekitar Perjanjian Persahabatan Indonesia-Mesir Tahun 1947*. Jakarta: Panitia Peringatan Hut ke 32 Perjanjian Persahabatan Indonesia-Mesir.
- Pramudya Ananta Toer. (1999). *Kronik Revolusi Indonesia Jilid II*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- . (2003). *Kronik Revolusi Indonesia Jilid IV*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Purn R. H. A Hidayat, dkk. (1992). *Indonesia Menyongsong Era Kebangkitan Nasional Kedua*. Jakarta: Yayasan Veteran RI.
- S. Nasution. (2001). *Sejarah Pendiidikan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soebadio Sastrosastomo. (1987). *Perjuangan Revolusi*. Jakarta : Dharma Aksara Perkasa.
- Solichin Salam. (1961). *Hadji Agus Salim: Hidup dan Perjuangannya*. Djakarta: Djajamurni.
- Sudiyo. (2002). *Pergerakan Nasional Mencapai dan Mempertahankan Kemerdekaan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- St Sulastro (ed). (2004). *Haji Agus Salim (1884-1954): Tentang Perang, Jihad, dan Pluralisme*. Jakarta: Gramedia.
- Susanto Tirtoprodjo. (1966). *Sedjarah Revolusi Nasional Indonesia Tahapan Revolusi Bersenjata 1945-1950*. Djakarta: Pembangunan.
- Taufik Abdullah, dkk. (1978). *Manusia dalam Kemelut Sejarah*. Jakarta: LP3ES.
- Wild, Colin dan Peter Carey. (1986). *Gelora Api Revolusi: Sebuah Antologi Sejarah*. Jakarta: Kerjasama BBC Seksi Indonesia dan Gramedia.